



## Klinik Konsultasi Pengawasan Ikut Memantau Kinerja di Tiap Instansi

**YOGYA, TRIBUN** Dilatarbelakangi keterbatasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Kota Yogyakarta membuka Klinik Konsultasi Pengawasan. Klinik ini diharapkan bisa dimanfaatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta jika ditemukan gejala gejala kasus yang perlu segera ditangani di tiap instansi.

Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta Wahyu Widayat mengatakan, Klinik Konsultasi Pengawasan akan membantu Inspektorat Kota Yogyakarta melakukan pengawasan kinerja dan potensi pelanggaran di SKPD pemkot. Sebab saat ini personel APIP di Kota Yogyakarta terbatas, terutama Pejabat Fungsional Auditor (PFA).

"Saat ini personel APIP yang kami miliki cuma 25 orang. Padahal sesuai dengan anjab (analisis jabatan, **Red**) seharusnya jumlah APIP ideal 80 orang," jelas Wahyu, Senin (13/10).

Lebih lanjut Wahyu menjelaskan, selama ini fungsi pengawasan hanya berlangsung satu arah. Artinya hanya Inspektorat yang bertindak aktif melakukan pengawasan dan pemeriksaan pada SKPD yang ada di Pemkot Yogyakarta.

Sementara Kota Yogyakarta juga telah

mencanangkan wilayah bebas korupsi. Jadi, semua pihak harus terlibat aktif untuk melakukan pengawasan. Termasuk pengawasan yang dilakukan pegawai masing-masing SKPD untuk mengawasi instansi tempatnya bekerja.

"Jadi diharapkan tidak cuma Inspektorat saja yang terlibat aktif dalam melakukan pengawasan, tetapi menjadikan para pegawai SKPD menjadi mitra kami. Sehingga bisa menciptakan SKPD yang bersih," ujar Wahyu.

Tak hanya itu, dengan pengawasan dua arah juga bisa membantu Inspektorat Kota Yogyakarta membagi persoalan yang dikonsultasikan. Misalnya persoalan yang bersifat publik, privat, atau persoalan X yang memiliki kecenderungan khusus dan tidak bisa dipublikasikan. Hal itu berguna juga untuk merumuskan penyelesaiannya.

Menurut Wahyu, saat ini kapabilitas APIP di Kota Yogyakarta baru sampai di level dua. Artinya APIP baru mampu menjamin proses sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi. Di Indonesia, jumlah APIP di pemerintahan yang sudah masuk level dua baru 15 persen.

"Kami menargetkan tahun depan, (APIP) di

Kota Yogyakarta sudah mencapai level tiga," kata dia Wahyu.

APIP level tiga diminta mampu untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan efisiensi kegiatan. Pun mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.

Tak hanya itu, adanya Klinik Konsultasi Pengawasan juga diharapkan mampu meningkatkan upaya pencegahan penyimpangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemkot Yogyakarta dan juga meminimalkan temuan pemeriksa eksternal.

Menurut Wahyu, temuan temuan pelanggaran di Pemkot Yogyakarta selama ini masih banyak ditemukan oleh pemeriksa eksternal. Pihaknya pun mulai ingin meningkatkan kapabilitas Inspektorat Kota Yogyakarta selaku APIP di Pemkot Yogyakarta dengan melakukan pemeriksaan dan pengawasan terlebih dahulu secara internal.

"Hal ini juga berguna untuk mengantisipasi munculnya permasalahan. Kalau bisa diantisipasi terlebih dahulu, sebelum masalah muncul," tegasnya. (tj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005